

**PENANGANAN *STUNTING* BALITA  
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
SASTRA MADANI  
NIM. 190802001**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sastra Madani  
Nim : 190802001  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Rutih, 24 September 2002  
Alamat : Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara,  
Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2023

Yang menyatakan

  
**SASTRA MADANI**  
NIM. 190802001

**LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN**

**PENANGANAN *STUNTING* BALITA DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**SASTRA MADANI**  
NIM. 190802001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **A R - R A N** Pembimbing II,

  
**Siti Nur Zalikhah, M.Si**  
NIP. 199002282018032001

  
**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si**  
NIP. 199007022020121010

# PENANGANAN *STUNTING* BALITA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023 M  
28 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,

  
Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 199007022020121010

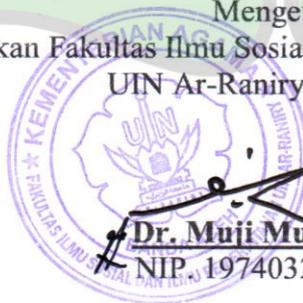
Penguji I,

  
Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Penguji II,

  
Mukhrizal, S.IP., M.IP  
NIP. 198810202022031002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulla, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Tingginya angka *stunting* balita di Aceh Tengah turut menjadi salah satu permasalahan di Aceh Tengah. Pada tahun 2018 prevalensi angka *stunting* di Aceh Tengah melampaui batasan angka nasional. Menerima data tersebut, Pemerintah Aceh Tengah melakukan keterlibatan dinas dan masyarakat dalam penanganan *stunting* tersebut melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* dan Keputusan Bupati Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui bagaimana koordinasi BKKBN, BAPPEDA, DPMK dan DINKES dalam penanganan *stunting* balita di kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta reduksi data, dependabilitas dan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan dengan baik dengan adanya Koordinasi dan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan angka *stunting* dan adanya kebersamaan antara Tim Percepatan Penurunan *stunting* (TPPS) sehingga angka *stunting* turun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implemementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Aceh Tengah telah dilaksanakan sesuai indikator dan koordinasi BKKBN, BAPPEDA, DINKES dan DPMK telah dilaksanakan sesuai indikator walaupun ada terjadi kendala dalam lapangan. Saran untuk penanganan *stunting* balita adalah adanya peningkatan pemahaman tentang teknologi aplikasi untuk penurunan *Stunting* agar masyarakat dan yang terkait memahami bahwa pentingnya mendeteksi angka *Stunting* sejak dini dan perlunya kesadaran dan lebih dekat lagi kepada masyarakat agar masyarakat ada inisiatif dalam dirinya bahwa pengukuran anak balita sangat penting dilaksanakan.

Kata Kunci: Koordinasi, Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, *Stunting*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi berjudul ”Penanganan *Stunting* Balita di Kabupaten Aceh Tengah.” Selanjutnya shalawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para alim ulama. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi penelitian ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat proses penulisan skripsi, dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah mendidik, memberikan saran serta memberi peneliti ruang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si., dosen pembimbing II akademik membimbing, mendidik, memberikan saran serta memberi peneliti ruang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si., dosen penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya sidang Munaqasyah Skripsi.
7. Mukhrijal, S.IP.,M.IP., dosen dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji peneliti sehingga terlaksananya sidang Munaqasyah

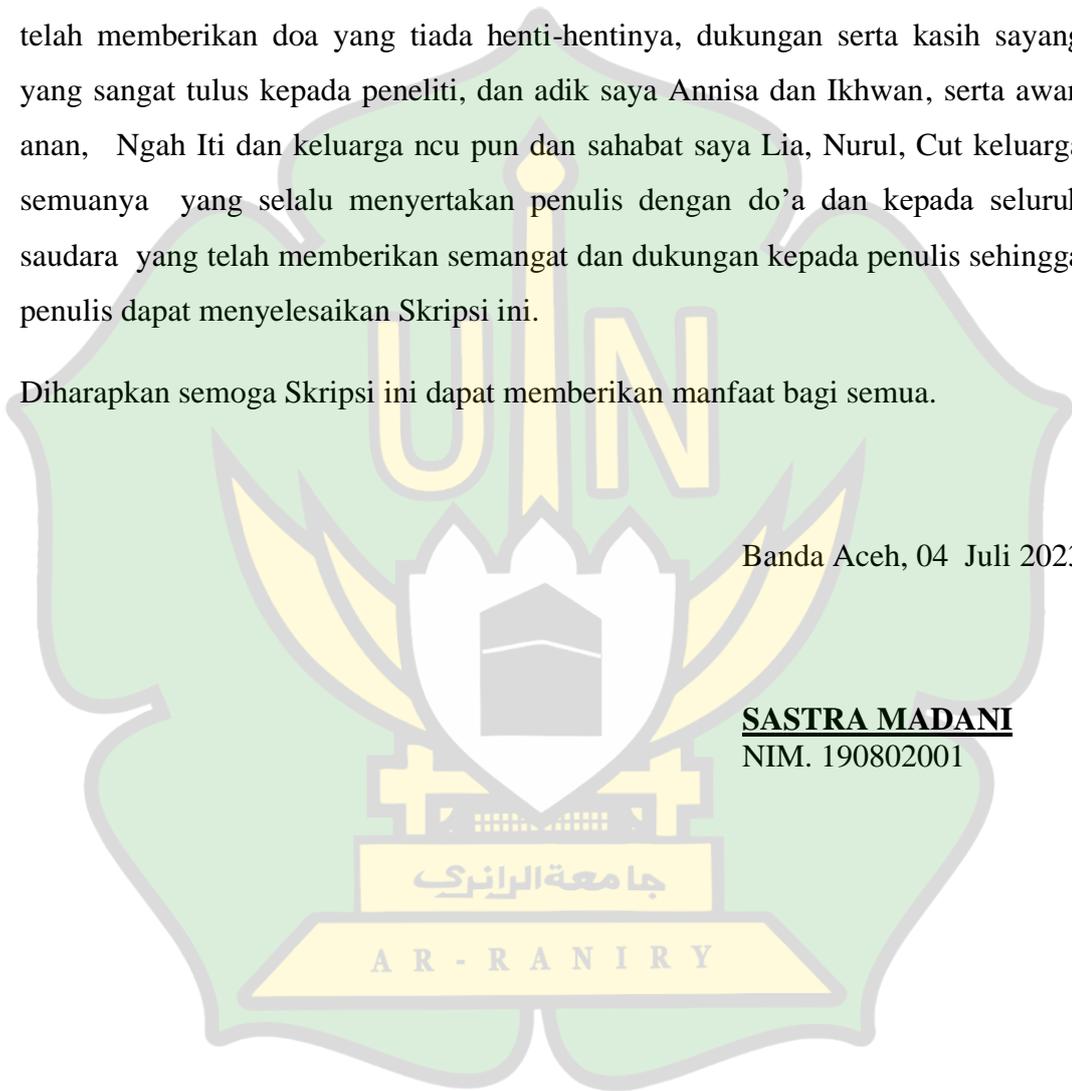
8. Kepada Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan saran serta bimbingan kepada Peneliti.

Teristimewa sekali untuk Ayahanda Sukiman dan Ibunda Asmarani yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya, dukungan serta kasih sayang yang sangat tulus kepada peneliti, dan adik saya Annisa dan Ikhwan, serta awan-anan, Ngah Iti dan keluarga ncu pun dan sahabat saya Lia, Nurul, Cut keluarga semuanya yang selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Diharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Banda Aceh, 04 Juli 2023

**SASTRA MADANI**  
NIM. 190802001



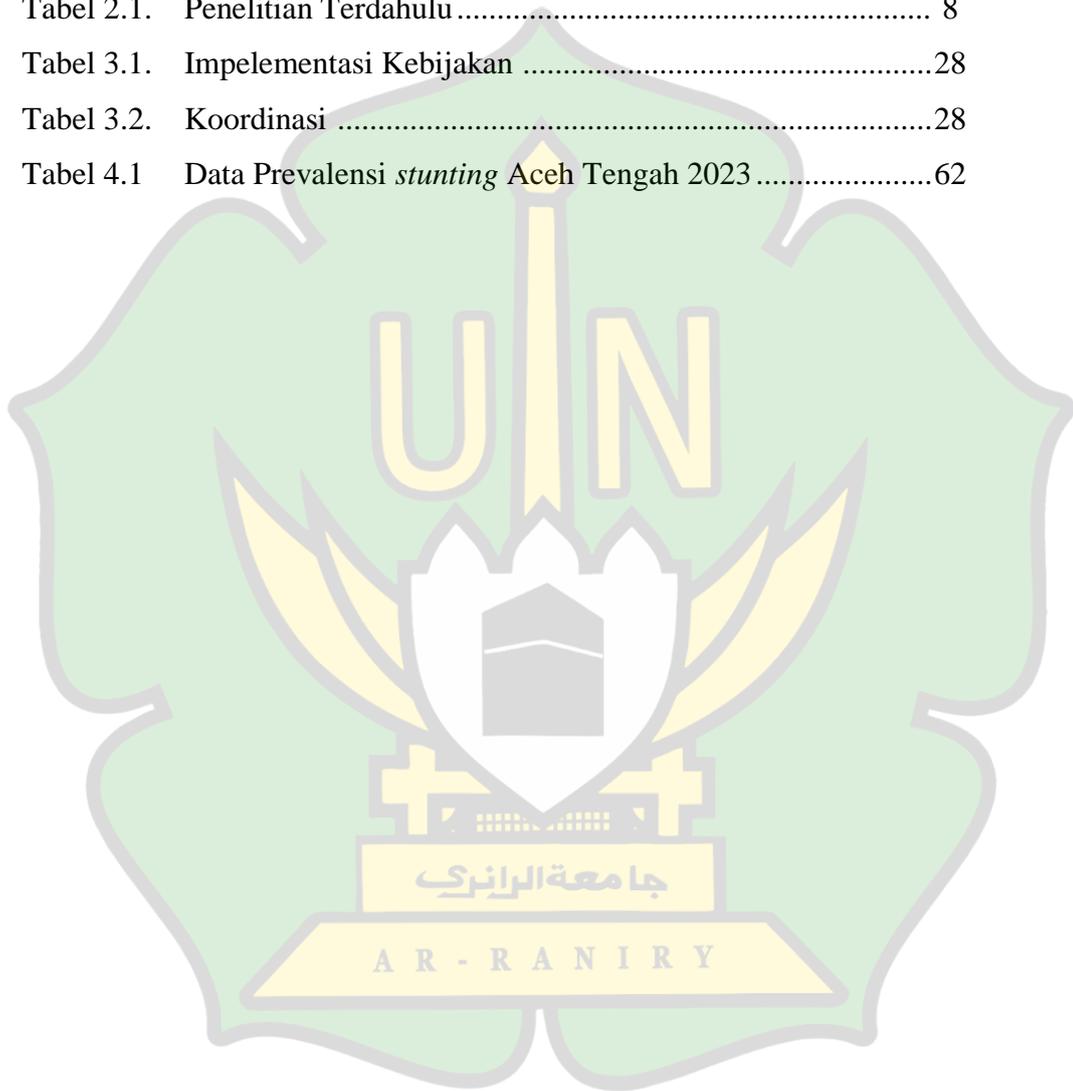
## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi .....	6
1.3. Perumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Landasan Teori .....	12
2.1.1 Konsep Stunting .....	12
2.1.2 Konvergensi Stunting .....	16
2.1.3 Penanganan Stunting .....	17
2.1.4 Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.5 Konsep Koordinasi .....	20
2.3. Kerangka Berpikir .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27
3.2. Fokus Penelitian .....	28

3.3. Lokasi Penelitian .....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5. Informan Penelitian .....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	32
3.8. Tekhnik Analis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian .....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	47
4.2.1 Implementasi Kebijakan dalam Penanganan <i>stunting</i> Balita di Kabupaten Aceh Tengah .....	47
4.2.2 Peran Antar Lembaga dalam Penanganan <i>stunting</i> Balita di Kabupaten Aceh Tengah .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data <i>Stunting</i> Di Indonesia Tahun 2022 .....	2
Tabel 1.2.	Data <i>Stunting</i> Di Kabupaten Aceh Tengah.....	5
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3.1.	Impelementasi Kebijakan .....	28
Tabel 3.2.	Koordinasi .....	28
Tabel 4.1	Data Prevalensi <i>stunting</i> Aceh Tengah 2023 .....	62



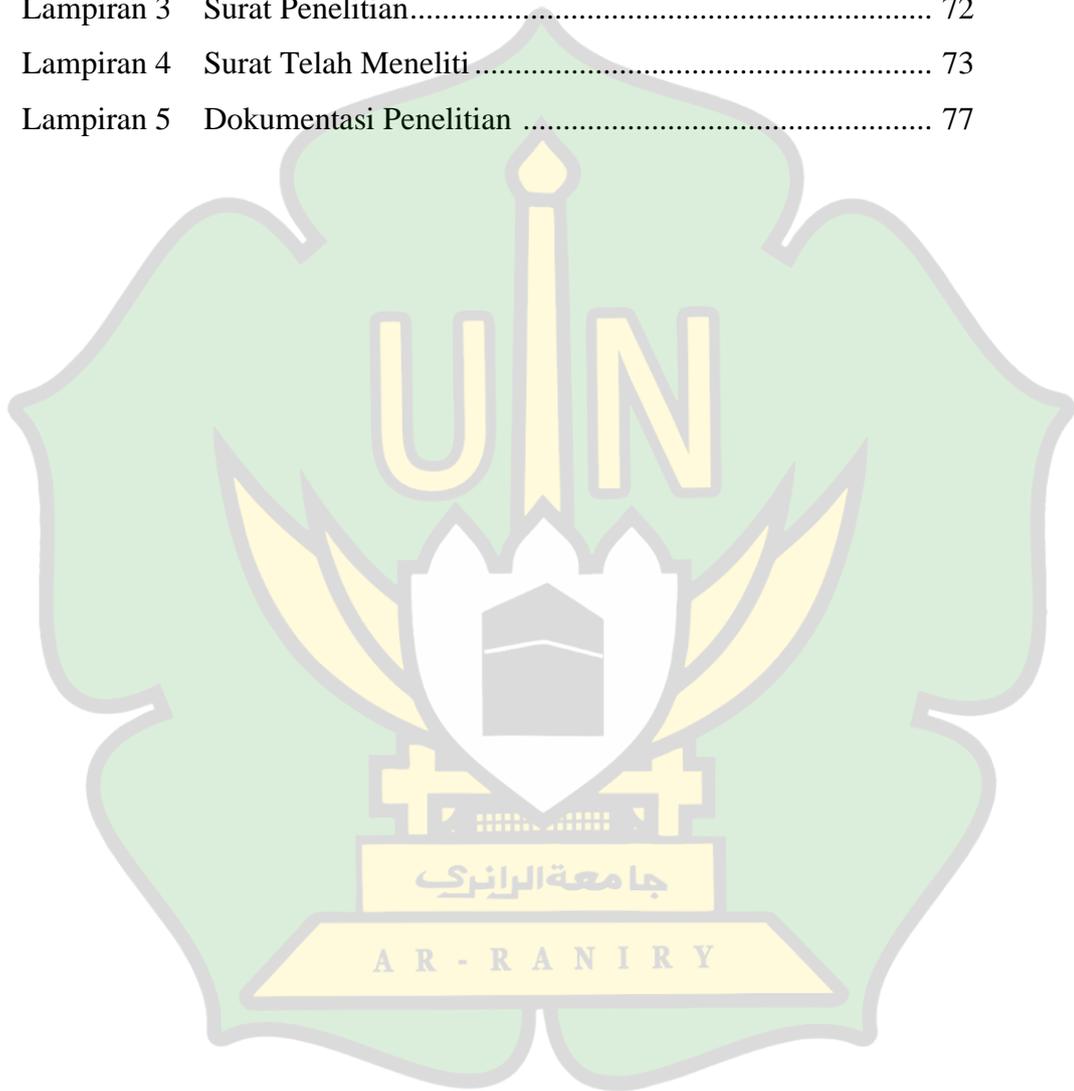
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Buku Isaran Bappeda Aceh Tengah.....	37
Gambar 4.2. Dokumentasi Pertemuan Langsung di Lut Tawar Coffee (LTC) membahas tentang penurunan <i>stunting</i> .....	50
Gambar 4.3. Dokumentasi sk Tim Percepatan Penanganan <i>stunting</i> (TPPS) Terkait tugas tugas pihak dalam penanganan <i>stunting</i> .....	57
Gambar 4.4. Data <i>stunting</i> Buku Isaran BAPPEDA Aceh Tengah .....	60
Gambar 4.5. Pertemuan dengan bupati terkait rembuk <i>stunting</i> 2022.	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara .....	69
Lampiran 2	Surat Keputusan Bimbingan Skripsi.....	71
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	72
Lampiran 4	Surat Telah Meneliti .....	73
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah umur lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. *Stunting* menjadi salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia yang hingga saat ini belum seluruhnya terselesaikan, yang jika tidak ditangani dengan tepat maka akan terjadi peningkatan angka *Stunting* yang signifikan dan tentunya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk kedepannya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan *Stunting* tersebut.<sup>1</sup>

*Stunting* berkembang menjadi fenomen-fenomena sosial dalam masalah pertumbuhan pada anak yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang. *Stunting* menghambat anak-anak untuk mencapai potensi fisik dan kognitif mereka. Usia 24 bulan pertama sangat penting untuk perkembangan otak. *Stunting* bukan hanya masalah pertumbuhan fisik yang terhambat, tetapi juga menyebabkan anak mudah sakit, serta adanya gangguan pada perkembangan otak dan kecerdasan sehingga *stunting* merupakan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia.

*Stunting* adalah suatu kondisi yang menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan dari masalah gizi kronis, gizi kronis adalah kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dan gizi kronis biasanya disebabkan oleh

---

<sup>1</sup>Kustanti Anita, *Sepenggal Kisah Inspiratif: Inovasi Pencegahan Stunting*, 2019.

kondisi sosial ekonomi yang buruk, kesehatan dan gizi ibu yang buruk dan sering sakit, dan pemberian makan dan perawatan bayi dan anak yang tidak tepat di awal kehidupan.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1.**

**Data *Stunting* Di Indonesia Tahun 2022**

No	Nama	2022	%
1	<i>Stunting</i> /Pendek	21,6	%
2	Washing/Kurus	7,7	%
3	<i>Underweight</i> /Gizi Kurang	17,1	%
4	<i>Overweight</i> /Gemuk	3,5	%

Sumber: Buku Saku Hasil Status Gizi (SSGI,2022)

Indonesia memiliki 38 provinsi adapun yang menduduki yang menduduki *Stunting* pada tahun 2022 tingkat pertama adalah Nusa Tenggara Timur mencapai 35,3% dan kedua Sulawesi Barat mencapai 35 % dan ketiga Papua 34,6% dan keempat Nusa Tenggara Barat 32,7% dan kelima Aceh 31,2% dan keenam Papua Barat 30% dan ketujuh Sulawesi Tengah 28,2% kedelapan Kalimantan Barat 27,8% kesembilan Sulawesi Tenggara 27,7% dan kesepuluh Sulawesi Selatan 27,2% adapun yang menduduki tingkat terendah adalah Bali yaitu sebesar 8%.<sup>3</sup>

Upaya Pemerintah menurunkan angka *Stunting* sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa:

<sup>2</sup> Syafrawati, *kenali Masalah Obesitas dan Gizi Kurang*, 2023.Sumatera Barat.

<sup>3</sup>Cindy Mutia Annur, 'No Title Daftra Prevalensi Balita *Stunting* Di Indonesia Pada 2022 Provinsi Mana Teratas?', 2 Bulan 2, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-Stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>>.

“menimbang dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*.”

Dalam Peraturan ini memutuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang Selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga terlibat dalam menangani *Stunting*.<sup>4</sup> Provinsi Aceh secara resmi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah daerah istimewa yang terletak di pulau sumatera. Secara Administratif provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 Kota.<sup>5</sup> Upaya Pemerintah menurunkan angka *Stunting* sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa:

“menimbang dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*.”

Dalam Peraturan ini memutuskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang Selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga terlibat dalam menangani

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>5</sup> Profil Pkp Daerah Provinsi Aceh', 12 Juni, 2020  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-Stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>>.

*Stunting*.<sup>6</sup> Provinsi Aceh secara resmi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah daerah istimewa yang terletak di pulau sumatera. Secara Administratif provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 Kota.<sup>7</sup> Provinsi Aceh menjadi Provinsi yang memiliki angka *Stunting* tinggi pada tahun 2022 yang angkanya mencapai 31,2%. Tingginya angka *Stunting* di Aceh menduduki peringkat ke 5.

Sebaran Data *Stunting* Balita di Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah yang pertama Kota Subulussalam sebesar 47,9 % yang kedua Kabupaten Aceh Utara sebesar 38,3% ketiga Kabupaten Pidie sebesar Jaya 37,8% keempat Kabupaten Simeulue sebesar 37,2 % kelima Kabupaten Bener Meriah sebesar 37% dan keenam Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 36,7 % ketujuh Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 35,2%.<sup>8</sup>

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh terkait penanganan *Stunting* yaitu mengeluarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh menimbang bahwa penanganan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan Milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian investasi Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

---

<sup>6</sup>Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

<sup>7</sup> 'Profil Pkp Daerah Provinsi Aceh', 12 Juni, 2020 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-Stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>>.

<sup>8</sup> Cindy Mutia Annur, 'Prevalensi Balita *Stunting* Provinsi Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota (2022)', 15-02, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/15/ini-wilayah-Aceh-dengan-prevalensi-Stunting-tertinggi-pada-2022>> [accessed 28 June 2023].

**Tabel 1.2.**  
**Data *Stunting* Di Kabupaten Aceh Tengah**

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	Persen
<i>Stunting</i>	58,30	42,87	36,77	34,3	32	%

*Sumber: Buku Hasil Studi Status Gizi Indonesia*

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa *Stunting* di Kabupaten Aceh Tengah mengalami angkanya naik turun setiap tahunnya. Menariknya kedudukan Aceh Tengah pada tahun sebelumnya yaitu 2018 dijadikan target *Stunting* dan sekarang sudah turun. Namun meskipun demikian Aceh Tengah masih berada di atas angka Nasional dan *Stunting* di Aceh Tengah pada tahun 2022 angkanya belum turun sesuai ditargetkan. Pemerintah Aceh Tengah terus melakukan solusi dan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan data penelitian Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Kasus *Stunting* Aceh Tengah mencapai 34,3 persen atau masuk dalam daftar dawar merah. Untuk tahun 2022, Pemerintah Aceh Tengah Menargetkan Penurunan *Stunting* mencapai 29,74%, tahun 2023 25,48% serta tahun 2024 akan berkurang mencapai 20,40%.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut sebagaimana Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* dalam diktum menyebutkan bahwa bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih banyak terjadi di kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.<sup>10</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerjasama dengan Dinas

<sup>9</sup> Junaidi, 'Aceh Tengah Terus Berbenah Turunkan Angka *Stunting*', 17 Maret, 2022 <<https://www.readers.id/read/aceh-tengah-terus-berbenah-turunkan-angka-Stunting/index.html>>.

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*

Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kabupaten Aceh Tengah mengadakan Fasilitasi dan koordinasi Satgas Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS). Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari tim percepatan penurunan *Stunting* (TPS) kabupaten Aceh Tengah yang sudah memiliki yang telah dibentuk melalui keputusan Bupati Aceh Tengah.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Bagaimana peran antar lembaga terhadap *Stunting* dengan judul “Penanganan *Stunting* Balita di kabupaten Aceh Tengah.”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Masih tingginya angka *stunting* di Aceh melebihi angka nasional.
2. Belum tercapainya atau sesuai target yang ditetapkan pemerintah Aceh Tengah untuk penurunan *stunting* pada tahun 2022.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implemetasi kebijakan penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana koordinasi BKKBN, BAPPEDA, DPMK, dan DINKES dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Aceh Tengah?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana impelementasi kebijakan penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>11</sup>Leni Apriani editor FMT, ‘Optimalkan Penurunan *Stunting* Bkbb Dan Dkbp3a Gelar Fasilitas dan Koordinasi Satgas Pps’, 23 FEBRUARI, 2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi BKKBN, BAPPEDA, DPMK, dan DINKES dalam penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah

### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi antar Lembaga di Kabupaten Aceh Tengah supaya terus meningkatkan penanganan terhadap *Stunting*.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

1. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah umur lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis.
2. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara koordinis, terpadu, dan bersama sama pada target sasaran.
3. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan penanganan secara langsung seperti asupan makanan, status Gizi Ibu, penyakit menular, infeksi dan kesehatan lingkungan.
4. Intervensi Gizi Sensitif adalah dilakukan melalui berbagai kegiatan di luar seperti memastikan akses air bersih dan sanitasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisa	Hasil Pembahasan
1	Irwanda, 2019 Universitas Uin AR-raniry Banda Aceh	Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kecamatan Tangse (Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Aceh).	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan Gubernur Aceh. Berdasarkan perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan disetiap SKPD, Pada hasil data pemantauan dan evaluasi menyatakan bahwasanya kegiatan sudah berjalan dan mencapai target hanya Rumoh Gizi Gampong, serta Rumah Pangan Lestari (RPL) belum mencapai target Persamaannya penelitian ini mengungkapkan Penanganan <i>Stunting</i> sesuai dengan peraturan namun perbedaannya penelitiannya dilakukan di

				kecamatan Tangse sedangkan penelitian ini Kabupaten Aceh Tengah
2	Fatris Rudmini, 2020	Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Prevalensi <i>stunting</i> pada Anak Balita di Kabupaten Simeulu	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi <i>Stunting</i> pada anak balita di Kabupaten Simeulue masih terbatas pada penyelenggaraan edukasi dan kegiatan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) pada tenaga kerja kesehatan di tingkat kabupaten, kader posyandu dan puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue juga membentuk suatu kerja sama, yang dinamakan kerjasama lintas sektor yang saling berkoordinasi dengan beberapa dinas lainnya yang dinamakan dengan SEKBER

				(Sekretariat Bersama), yang melibatkan Bappeda, Dinas Pembangunan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas terkait lainnya dalam menanggulangi <i>Stunting</i> di Kabupaten Simeulue.
3	Raisya Putri Pratama Sari dan Maria Montessori 2021	Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah <i>Stunting</i> Pada Anak Balita	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus di Kenagarian Kambang Barat. Program tersebut seperti mendirikan pos gizi setiap nagari, mengadakan sosialisasi terkait permasalahan <i>Stunting</i> , dan memberikan PMT bagi ibu hamil dan balita. Namun program tersebut belum berjalan

				<p>maksimal karena belum semua nagari terdapat pos gizi, hanya beberapa nagari saja. Upaya tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yakni memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait <i>Stunting</i>, memperbaiki dan meningkatkan status gizi anak, dan memantau pertumbuhan balita.</p>
4.	Rahmi Lestari, 2022	<p><i>collaborative governance</i> dalam program Gerakan Untuk Anak Sehat: Sabang (Geunaseh)</p>		<p>menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan indikator dialog tatap muka, membangun rasa percaya antar stakeholder, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara sudah berjalan dalam kolaborasi ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan</p>

				<p>prevalensi <i>Stunting</i> yang cukup signifikan yang didorong dengan adanya partisipasi dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi ini terbilang aktif dengan komitmen yang tinggi serta adanya program-program terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan <i>Stunting</i>.</p>
--	--	--	--	---

## 2.2 Landasan Teori

### 2.1.1. Konsep *Stunting*

“WHO (*World Health Organization*) adalah organisasi Kesehatan Dunia yang mendefinisikan *Stunting* sebagai gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan/ dan nutrisi yang tidak optimal.”<sup>12</sup> *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

<sup>12</sup>Endy. P.prawiroharto, *Stunting dari teori dan bukti ke implementasi di lapangan*, ed. by hadi prasetyo (yogyakarta: 2021, 2021).

*Stunting* terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. *Stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *Stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.<sup>13</sup> *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (Bagi bayi di bawah lima tahun) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *Stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. *Stunting* yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kehidupan mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. *Stunting* dapat pula disebabkan tidak melewati periode emas yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan pembentukan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama. Pada masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat didalam kandungan dan menerima ASI memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat dewasa. Hal ini dapat terlampaui maka

---

<sup>13</sup>Reni Indriani Sutarto, Diana Mayasari, '*Stunting*, Faktor Resiko Dan Pencegahannya', *Agromedicine*, 5.1 (2018), 541.

akan terhindar dari terjadinya *Stunting* pada anak-anak dan status gizi yang kurang.

*Stunting* merupakan istilah para nutrisi untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). *Stunting* (tubuh pendek) adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD dibawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. *Stunting* adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Dan konsep *stunting* diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Indikator *Stunting***

*Stunting* adalah tinggi badan yang kurang menurut umur ( $<-2SD$ ), ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. *Stunting* merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan dimasa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang. Untuk gizi kurang pada anak. *Stunting* dapat didiagnosis melalui indeks antropometri tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatan.

*Stunting* merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. *Stunting* yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka

kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang.

## **2. Penyebab *Stunting***

Pada masa ini merupakan proses terjadinya *Stunting* pada anak dan peluang peningkatan *Stunting* terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *Intrauterine Growth Retardation*, sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya *Stunting*.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* beberapa faktor yang terkait dengan kejadian *stunting* berhubungan dengan berbagai macam faktor yaitu faktor karakteristik orang tua yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pola asuh, pola makan dan jumlah anggota dalam keluarga, faktor genetik, penyakit

infeksi, kejadian BBL, kekurangan energi dan protein, sering mengalami penyakit kronis, praktek pemberian makan yang tidak sesuai.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Konvergensi *Stunting*/ Pencegahan *Stunting* Secara Terpadu**

Pencegahan *Stunting* dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*. Upaya percepatan pencegahan *Stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan keluarga prioritas untuk mencegah *Stunting*. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Bawon Nul Hakim wahida Yuliana, *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga* (Sulawesi Selatan, 2019).

<sup>15</sup>Aspar Abdul Gani, 'Studi Operasional Penurunan *Stunting* Melalui Upaya Konvergensi Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah' (Hasanuddin Makassar, 2020).

### 2.1.3 Penanganan *Stunting*

Upaya penurunan *Stunting* dilakukan dengan dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi intensif.

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan penanganan secara langsung seperti asupan makanan, status gizi Ibu, penyakit menular, infeksi, dan kesehatan lingkungan. Intervensi ini lebih ditujukan pada anak periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang memiliki kontribusi 30% penurunan *Stunting*. Intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan dimulai sejak kehamilan Ibu hingga melahirkan Balita.

Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan dan memiliki kontribusi 60% intervensi *Stunting*. Intervensi ini meliputi penyediaan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi, menyediakan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua dan memberikan edukasi kesehatan seksual, reproduksi serta gizi remaja.<sup>16</sup> Dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2018 tentang penurunan *stunting* dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Kabupaten Aceh Tengah kepada dinas dan dibantu oleh tim penurunan *stunting*. Tim penurunan *Stunting* terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Dela Rosita Sari, 'Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021' (Lampung, 2023).

<sup>17</sup> Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2018 tentang penurunan *Stunting*

### 2.1.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang diterapkannya. Teori implementasi kebijakan meliputi:

#### 1. Teori George C. Edward III

Berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat, demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan *Fragmentasi*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi yang fleksibel.

## 2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi Menurut Merilee S. Grindle. Dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Joko Pramono, *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia*, ed. by Andika Drajat Murdani (Surakarta, 2022).

### 2.1.5 Konsep Koordinasi

Koordinasi dan kinerja adalah dua arti yang saling terkait, karena hanya kinerja yang efektif yang dapat mencapai koordinasi sebaik mungkin. Koordinasi dalam suatu organisasi adalah pengaturan dalam arti aktif bukan dalam arti pasif, yaitu penetapan aturan untuk semua tindakan, kegiatan, dan kinerja antara atasan dan bawahan dengan tugas dan kewajiban, serta wewenang saling terkait, suatu pengaturan yang dirancang untuk mencegah kebingungan dan kegiatan saling tumpang tindih, yang dapat menyebabkan pemborosan dan efek negatif pada moral dan ketertiban kerja.

Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan unit yang berbeda (departemen atau area fungsional) dan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dan menurut Hasibuan dalam Amirudin koordinasi adalah menyeimbangkan dan menggerakkan tim dengan menyediakan lokasi untuk aktivitas kerja yang sesuai untuk setiap individu dan memastikan aktivitas tersebut terjadi dalam keharmonisan yang tepat diantara anggota. Menurut Sukma dalam Amirudin koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur, upaya menyediakan jumlah yang tepat, waktu untuk memandu pelaksanaan, sehingga mengambil tindakan yang serasi dan terpadu untuk tujuan lain.

Cara-cara mengadakan koordinasi dalam organisasi adalah :

1. Memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat, keterangan mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.

2. Mengupayakan agar pemahaman dan penerimaan anggota tentang apa yang ingin dicapai tidak disadarkan pada tujuan masing-masing anggota: tetapi tujuannya adalah tujuan bersama.
3. Mendorong para anggota bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian sasaran.
5. Membina hubungan kerja sama yang baik antara sesama karyawan.

Koordinasi adalah proses dimana atasan secara teratur merumuskan pola usaha tim berdasarkan struktur di atas bawahan mereka dan memastikan tindakan terpadu dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa organisasi antara individu dan kelompok, kontrol atas peran mereka dalam organisasi akan hilang.

Ciri-ciri organisasi adalah

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Dengan demikian koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemimpin. Dikatakan bahwa pemimpin berhasil karena dia berkoordinasi dengan baik.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama

Koordinasi adalah upaya kerja sama. Hal ini dikarenakan kerja sama merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya.

3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus

Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur

Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Ini karena koordinasi adalah konsep yang berlaku untuk kelompok, bukan untuk upaya individu, tetapi untuk banyak individu yang bekerja sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi

Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, artinya pemimpin harus mengorganisasikan usaha/tindakan dari setiap kegiatan individu agar ada keselarasan dalam tim yang mereka kerjakan bersama

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama

Tujuan organisasi adalah tujuan bersama kesatuan usaha/tindakan membutuhkan kesadaran/ pemahaman dari semua individu agar dapat berpartisipasi sebagai sebuah tim dimana mereka bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

## 1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

### a) Kesatuan Tindakan

Koordinasi pada hakikatnya membutuhkan setiap anggota organisasi atau unit organisasi untuk menyadari keselarasan timbal balik atau penyesuaian tanggung jawabnya dengan anggota atau unit organisasi lainnya atau tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, konsep

kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi kesatuan usaha berarti pemimpin harus mengatur usaha setiap kegiatan rupa sehingga ada koordinasi dalam mencapai tujuan. Unit tindakan ini merupakan kewajiban pimpinan untuk mencapai koordinasi yang baik dengan menetapkan jadwal yang bertujuan agar unit bisnis dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan.

**b) Pembagian Kerja**

Dalam suatu organisasi, pilar dasarnya adalah pembagian kerja. Prinsip pembagian kinerja kerja ini adalah jika suatu organisasi diharapkan dapat berhasil mencapai tujuannya, maka ia harus membagi kerjanya. Dengan diberlakukannya pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam upaya dapat mencapai tujuan organisasi. Pembagian kerja adalah pembagian tugas dan pekerjaan sehingga setiap orang dalam suatu organisasi bertanggungjawab untuk melakukan serangkaian kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja mengarah pada peningkatan efektivitas kerja yang drastis karena tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan semua tugas atau aktivitas kompleks sendirian.

**c) Disiplin**

Konsep disiplin kerja memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan manajer dalam karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku dan bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku. Disiplin melibatkan sikap dan perilaku dimana individu dan kelompok

mematuhi dan tunduk atas aturan organisasi, jadi kedisiplinana sangat penting dalam proses pencapaian tujuan, merupakan syarat yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara jelas, disiplin adalah suatu sikap dan perilaku, baik itu individu maupun kelompok, untuk taat dan patuh terhadap aturan-aturan organisasi.<sup>19</sup>

## 2. Unsur Koordinasi

Dalam proses koordinasi, ada beberapa unsur yang terlibat, yaitu:

- a) Koordinasi, adalah seseorang yang memiliki ide, pendapat, gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pemimpin dalam sebuah organisasi harus menjadi seseorang koordinasi yang handal untuk menyampaikan semua pemikiran- pemikiran yang dimilikinya guna mendukung terlaksananya semua kegiatan dan terwujudnya tujuan/ sasaran yang diinginkan.
- b) Koordinasi, adalah seseorang yang menerima pesan dari pemberi pesan( koordinasi). Koordinasi harus bisa memahami pesan yang disampaikan oleh koordinasi, sehingga pesan tersebut dapat diterjemahkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan.
- c) Tujuan, adalah sesuatu hal yang diinginkan, dicapai, atau dibutuhkan dan proses berkoordinasi.
- d) Ide atau gagasan, adalah sesuatu alat pendukung untuk orang lain, sehingga oranglain dapat memahami dan menindaklanjuti dalam bentuk tindakan.
- e) Media, adalah saluran koordinasi yang digunakan untuk menghubungkan seseorang koordinasi dalam menyampaikan koordinasi.

---

<sup>19</sup>Amiruddin, *Pertumbuhan Ekonomi, Mobilitas Sosial dan Perdagangan Transportasi Laut*. CV Budi Utama Deepublish Yogyakarta 2023.

- f) Umpan balik, adalah hasil yang telah dicapai dari proses koordinasi.
- g) Gangguan atau hambatan, adalah situasi atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya proses koordinasi.

### **3. Prinsip-Prinsip Koordinasi**

- a) Efisien
- b) Kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)
- c) Ketetapan penggunaan alat koordinasi
- d) Koordinasi yang strategis

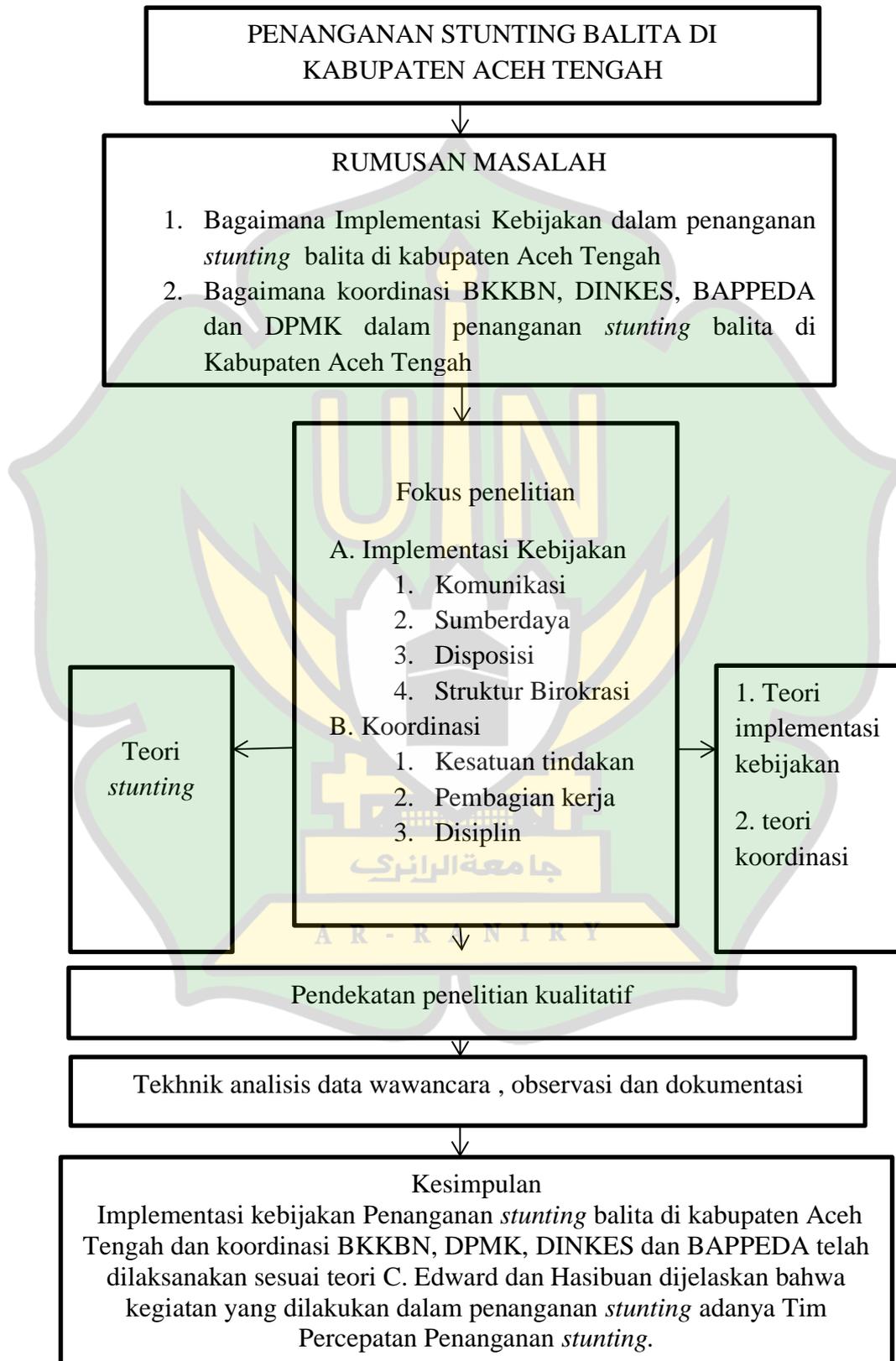
### **4. Syarat-Syarat Koordinasi**

- a) Hubungan langsung
- b) Kontinuitas
- c) Kesepakatan awal
- d) Dinamisme
- e) Tujuan yang jelas
- f) Organisasi yang sederhana
- g) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
- h) Komunikasi yang efektif
- i) Komunikasi yang efektif<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dodi Pramana dkk, Budaya Organisasi. CV Merdeka Kreasi Group. Medan penerbit Nasional. 2022.

### 2.3 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat multimethod, naturalistik, dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Menurut Kirk dan Miller dalam Anggito mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan.

Erickson dalam Anggito menyatakan bahwa “penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.”<sup>21</sup> Jadi kesimpulannya adalah bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kebijakan dan peran antar lembaga dalam penanganan *Stunting* di kabupaten Aceh Tengah.

---

<sup>21</sup>Kardian Rivai.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sasaran dari penelitian yang ingin dicapai yaitu Bagaimana Kebijakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Penanganan *Stunting* serta untuk dapat mengkaji koordinasi DPMK, DINKES, BAPPEDA, dan BKKBN lembaga dalam menangani *Stunting* di kabupaten Aceh Tengah

**Tabel 3.1**  
**Implementasi Kebijakan**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	Teori George C. Edward III

**Tabel 3.2**  
**Koordinasi**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
Koordinasi	1. Koordinasi 2. Kesatuan tindakan 3. Pembagian kerja 4. Disiplin	Teori Hasibuan

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu ingin dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu Linge, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Pegasing, Bies, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, dan Celala.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Nuri Rosmita, 'Badan Pusat Statistik Aceh Tengah', 2023.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.<sup>23</sup> Adapun data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah bersumber dari data wawancara dan observasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data Sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain lain.<sup>24</sup> Adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber arsip ABKKBN, Undang-undang Buku, website, Dinkes, Bappeda, Dpmk, dan BPS

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam setiap penelitian, diperlukan adanya informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian dengan cara mewawancarainya. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, gunanya untuk memperoleh

---

<sup>23</sup>Siyotho Sandu, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta, 2015).

<sup>24</sup> Sandu.

informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>25</sup> pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan tertentu sehingga bisa menanggapi kasus riset. Arikunto pengertiannya merupakan metode mengumpulkan ilustrasi yang bersumber pada suatu random, wilayah stratan melainkan bersumber pada terdapatnya pandangan yang berfokus pada tujuan tertentu<sup>26</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan BKKBN	1 Orang	Pihak yang berwenang dalam penurunan <i>Stunting</i>
2	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang	Pihak yang berperan dalam kesehatan masyarakat
3	Kepala DPMG	1 Orang	Pihak yang berperan untuk pelaksanaan pelayanan urusan masyarakat
4	Kepala Bappeda	1 Orang	Pihak yang berwenang dalam membentuk tim panelis penilai kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi penurunan <i>Stunting</i>
Jumlah		4 Orang	

<sup>25</sup>Nur Sayidah, *Metodolologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Jawa Timur, 2018).

<sup>26</sup>Ika Isnaini, 'Tekhnik Pengambilan Sampel Purpose Dan Snowball Sampling', *Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 17.2 (2017).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.6.1 Observasi

Observasi yaitu tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>27</sup> Maka dari itu yang ingin diobservasi pada penelitian ini yaitu mengamati bagaimana kebijakan Penanganan *Stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana koordinasi DPMK, DINKES, BAPPEDA, dan BKKBN dalam penanganan *Stunting* di Kabupaten Aceh Tengah.

#### 3.6.2 Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tersebut. Menurut Moleong dalam Mamik menyebutkan bahwa “ wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.” Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala dinas Badan Kependudukan dan Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK) Aceh Tengah, Kepala Dinas

---

<sup>27</sup>Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, ed. by Anwar Chairuel (Taman Siduarjo, 2015).

<sup>28</sup>Mamik.

Kesehatan (DINKES) Aceh Tengah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar surat-surat resmi dan lain sebagainya. Selain bentuk bentuk di atas bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik.<sup>29</sup> Adapun dokumen yang ingin dicari adalah melihat data *Stunting*, buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tengah dan Regulasi dan Surat Keputusan (SK) tentang *Stunting*.

## **3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.**

### **3.7.1 Trianggulasi**

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Trianggulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik dan waktu.

### **3.7.2 Member Cek**

Merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data, adapun tujuan dilakukannya member cek yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Member cek dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual

---

<sup>29</sup> Mamik.

yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini data dapat ditambah dikurangi ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperoleh kesepakatan bersama dapat berupa dokumen yang telah di tanda tangan.<sup>30</sup>

### 3. 8 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman, Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, kemudian dilakukan pengelompokan untuk menjadi bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian, peneliti akan memberikan konfirmasi terhadap informan penelitian lainnya untuk bisa memperoleh data yang valid. Setelah data-data ini diolah selanjutnya peneliti akan membahas data yang bersifat kualitatif tersebut dalam bentuk deskriptif dengan menganalisisnya secara seksama dalam bentuk deskriptif dengan menganalisisnya dan pada akhirnya memberikan. Dalam analisis data memiliki Teknik Analisis data, sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan data yang dari catatan yang ada di lapangan.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara untuk diadakan suatu kesimpulan.

---

<sup>30</sup>Arnild Mekarisce Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

### 3. Gambar Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ini merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang telah diteliti di lapangan akan disajikan secara terperinci oleh peneliti dalam bab ini. Pada pembahasan sesuai dengan hasil yang telah diperoleh peneliti pada saat melaksanakan wawancara secara langsung dengan kepala (Badan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN Aceh Tengah, Bapak Analisis sumber daya manusia pada bidang perencanaan sosial dan SDM di (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) BAPPEDA Aceh Tengah, Kabid KPM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tengah. Yang terkait merupakan bagian dari yang memperhatikan tingkat *Stunting*. Adapun uraian tersebut merupakan penjabaran peneliti yang telah dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Maka hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian**

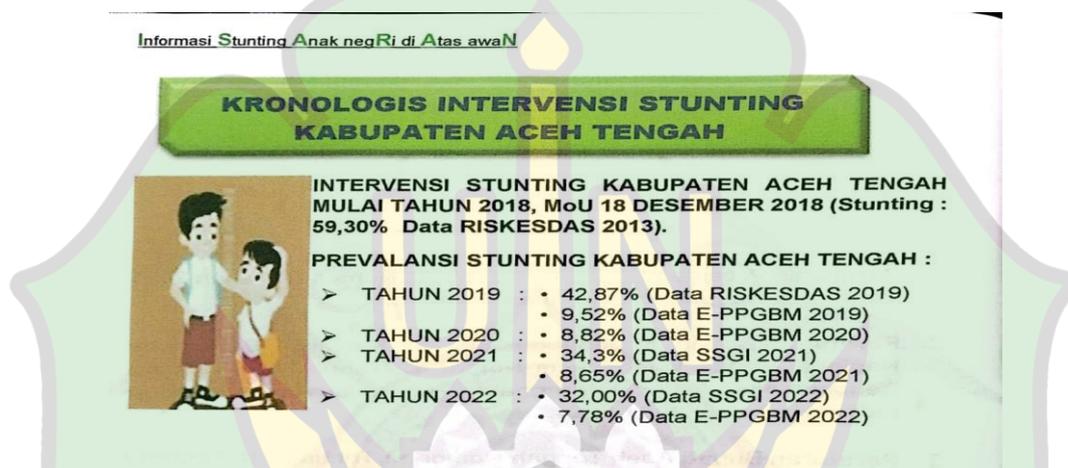
Kabupaten Aceh Tengah dibentuk dengan Undang-Undang 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya pada tahun 1974 terjadi pemekaran Daerah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 dimana kewedanan Gayo Lues dan Tanah Alas berubah status menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan pada tahun 2003 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam provinsi Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 201, ayat 8 berbunyi pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022. Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kawasan pertanian dengan Produk Unggulan Kopi Arabika Gayo dan Pariwisata, didukung dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 200 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl.

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak pada 40 22' 14,42" – 40 42' 40,8" LU dan 96 15' 23,6" – 97 22' 10,76" BT. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Aceh Tengah berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues dan Pidie, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas sebesar 452.753,40 ha.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 wilayah Kecamatan, 295 Kampung. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Linge (186.266,36 ha), dan yang paling kecil adalah Bies (1.401,43 ha). Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).



**Gambar 4.1. Buku Isaran**

Sumber: Buku Isaran Bappeda Aceh Tengah 2023

#### **A. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN)**

Di Aceh Tengah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) disebut juga Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah (DKBP3A) Terletak di jalan Lukup Badak, Simpang Kelaping, Kec, Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2014, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya menyangkut dalam Bidang Kesejahteraan keluarga, perlindungan ibu

dan Anak. Sebagai sebuah Organisasi, susunan kepegawaian atau struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan langsung bertanggung jawab pada Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah, dijabat oleh pejabat eselon II.b yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### 2. Bagian Sekretariat

Bagian sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian sekretariat terdiri dari:

- a. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum.
- b. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan, menyimpulkan, analisis, data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi

- c. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

### 3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)

Bidang KB/KR adalah unsur pelaksana teknis di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang KB/KR terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesetaraan KB
- b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
- c. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB sasaran khusus

### 4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS/PK)

Bidang KS/PK adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b. Bidang KS/PK terdiri dari:

- a. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga
- b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Remaja
- c. Sub Bidang Data dan Informasi

### 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP/PA)

Bidang PP/PA adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.b

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang PP/PA terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
  - b. Sub Bidang Perlindungan Anak dan
  - c. Sub Bidang pengembangan data perempuan dan anak
6. UPTD Bina Keluarga Perempuan dan Anak
- Memiliki tugas dan fungsi sebagai sarana dalam membina keluarga dan melindungi hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak.
7. Jabatan Fungsional (PLKB)

Mempunyai tugas yaitu Melaksanakan, mengendalikan serta mengelola informasi Keluarga dan Pelaksana analisis Program Keluarga Berencana.

#### **B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Aceh Tengah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

## 1. Kepala Badan,

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial budaya dan SDM, penelitian dan Pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan penelitian, pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan.
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi, pengendalian perencanaan pembangunan di daerah
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Pembinaan UPTB Pusat Data Geospasial dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan

- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala .

**6. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya Dan Sumber Daya Manusia**

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan sumber Daya manusia mempunyai fungsi:

- a. menyusun program/kegiatan kerja tahunan di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
- b. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD terkait dalam hal penyusunan program/kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
- c. Melakukan sinkronisasi program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan visi misi Bupati yang berada di bawah koordinasi bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
- d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan sosial, budaya dan sumber daya manusia
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ke dalam dan luar daerah yang berkaitan dengan perencanaan sosial budaya dan sumber daya manusia

- f. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di bawah koordinasi bidang; dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan

#### **7. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan**

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
- d. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

#### **8. Bidang Perencanaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :**

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan mensinergikan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana
- d. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**9. Bidang Penelitian dan Pengembangan** Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi:

- a. Pelaksanaan Perencanaan Strategis pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan
- d. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi perencanaan daerah dengan Badan/Dinas/ Lembaga/Instansi terkait
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**10. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan** Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan analisa data hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi/*monitoring* dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.

- d. Pelaksanaan penyajian data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan atau lembaga terkait di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Dinas Kesehatan (DINKES) Aceh Tengah**

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan. Fungsi dan Rincian tugas dari sekretaris dan masing-masing bidang dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

#### **D. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung ( DPMK ) Aceh Tengah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Tengah. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Seksi Bagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi
  - b. Seksi Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang kelembagaan Partisipasi Masyarakat
  - a. Seksi Bidang Penataan Kelembagaan
  - b. Seksi Bidang Perencanaan dan Pembangunan partisipatif Masyarakat
  - c. Seksi Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat

#### 4. Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim

- a. Seksi Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Aparatur Kampung/Mukim.
- b. Seksi Bidang Perencanaan dan Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Kampung/Mukim
- c. Seksi Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kekayaan Kampung/Mukim

### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.2.1 Implementasi Kebijakan dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Aceh Tengah**

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa penanganan *stunting* telah dilakukan diatur dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting*, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penurunan *Stunting*, keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 050/215/DKBPPPA/2022 Tentang Penetapan lokasi Fokus Intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi dalam kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023, dan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 260/17/DKBPPPA/2022 Tentang Penunjukan/ penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan *stunting* balita di kabupaten Aceh

Tengah, dan bagaimana peran antar lembaga dalam penanganan *stunting* balita di kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 260/17/DKBPPPA/2022 Tentang Penunjukan/penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian implementasi kebijakan dalam penanganan *stunting* di Aceh Tengah dapat diukur dalam indikator berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah langkah awal dalam implementasi kebijakan. komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi. Tujuan dari komunikasi adalah untuk penggerak mengerjakan sesuatu baik itu kegiatan bakti, sosialisasi dan sebagainya. Selanjutnya regulasi yang menjadi acuan dari indikator komunikasi adalah Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* : pasal 16 disebutkan bahwa pengarah memberikan arahan terkait percepatan penurunan *stunting*. Dalam proses ini para pihak pihak yang terlibat dalam penanganan *stunting* membangun komunikasi secara langsung dan mendengarkan arahan melalui pada bidang Perencanaan Sosial Budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa:

*“Komunikasi kami dalam penanganan Stunting dilakukan secara langsung melalui pertemuan itu tergantung situasi dan kondisi bisa dalam sebulan sekali bisa atau dua kali tergantung situasi dan kondisi, dan komunikasi yang tidak langsung nya melalui whatsapp kami buat grup untuk membahas Stunting balita di kabupaten Aceh Tengah disini kami bisa tau*

*informasi tentang Stunting kapan kami melakukan pertemuan dan sebagainya.”<sup>32</sup>*

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;

*“Proses komunikasi kami dalam menangani Stunting itu adalah dengan melakukan pertemuan dan pembahasan bisa melalui hp yaitu kami ada grup whatsapp terkait itu tim kami juga melakukan pertemuan tergantung situasinya bisa di cafe atau di gedung dalam sebulan ada sekali dan dua kali tergantung situasi pada kondisi Stunting itu. ”<sup>33</sup>*

Sementara itu kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni:

*“Komunikasi terkait penanganan Stunting balita ini kami dan pihak lainnya yang terkait yaitu tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) mengadakan pertemuan yang dilakukan dalam sebulan itu selalu ada baik sekali dan dua kali dalam sebulan berdasarkan situasi dan kondisinya ketika parah kali kondisi angka Stuntingnya kami melakukan sebulan 3 kali pertemuan untuk membahas terkait penanganan Stunting balita dan baru baru saja kami melakukan pertemuan di Lut Tawar Cafe (LTC) yang dibuka oleh saya sendiri dan kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) dan kami membahas tentang lima pilar strategi percepatan penurunan Stunting. ”<sup>34</sup>*

Pernyataan dari kepala dinas BKKBN Aceh Tengah diperkuat dengan pernyataan kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi , S.E mengemukakan yakni:

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

“Dalam hal komunikasi kami juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan ikut mendukung dalam sebulan itu paling banyaknya dua kali pertemuan terkait penanganan *Stunting* dan kami juga melakukan interaksi dalam grup whatsapp.”<sup>35</sup>



**Gambar 4.2. Pertemuan Langsung di Lut Tawar Coffee (LTC) Membahas tentang Penurunan *Stunting***

Sumber: Dinas DPMK Aceh Tengah, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara berkaitan dengan indikator komunikasi telah memuaskan, dalam implementasi kebijakan turut dilakukan oleh para dinas dan Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) yang terlibat pada penanganan *stunting* balita di Aceh Tengah melalui komunikasi paha pihak-pihak yang terlibat akan saling mendukung untuk mendapatkan keputusan bersama. komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* sudah berlangsung sejak terbentuknya Peraturan Bupati Aceh Tengah terkait penanganan *stunting*. indikator komunikasi dalam upaya penanganan *stunting* balita merupakan faktor pendorong terjalannya keterbukaan dalam informasi, berjalan dengan baik karena memiliki visi misi dan tujuan yang sama antar pemerintah.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

Adanya komunikasi adalah untuk mendorong kebijakan yang baik dan jelas berkaitan dengan munculnya persoalan di lapangan dan melalui komunikasi yang baik dapat memperkuat proses penanganan *stunting* balita. Dan adanya komunikasi yang baik akan sangat membantu pihak untuk memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman dan memberikan rasa nyaman dan rasa aman untuk melakukan suatu kegiatan. Indikator komunikasi menurut teori George C. Edward III telah dilaksanakan dengan baik tentu keberhasilan dalam indikator ini menjadi motivasi bagi para pihak untuk meningkatkan kinerjanya.

## **2. Sumber Daya**

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, sumber daya juga harus terlibat dalam suatu kebijakan. sumber daya adalah faktor yang penting dalam suatu kebijakan dan sumberdaya adalah faktor yang mendukung suatu program sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Tujuan Sumber daya adalah untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. selanjutnya regulasi yang menjadi acuan dalam sumber daya ini adalah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang penurunan *stunting*. segala sumber daya dikerahkan untuk penurunan *stunting* mulai dari SDM, peralatan dan lainya seperti mengerahkan kesehatan, dan tenaga gizi. Sumber daya dalam penanganan *stunting* balita meliputi sumber daya manusia, peralatan, kewenangan, dan anggaran. Sumber daya dalam penanganan *stunting* balita Aceh Tengah sangat perlu dilakukan karena tanpa ada dukungan sumber daya maka keberhasilan tidak akan dicapai. Dengan sumber daya maka penanganan *stunting* balita dapat di

tangan dengan baik. Menurut Analisis SDM Aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa:

*“Dalam penanganan Stunting balita sumber daya semuanya terkait, yaitu bisa dilihat dari sk tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) segalanya dikerahkan mulai dari kader desa, pendamping keluarga kader pembangunan manusia dan semuanya terlibat.. karena penanganan Stunting ini harus melibatkan semuanya antar pihak pemerintah dan masyarakat semua ikut serta.”<sup>36</sup>*

Sementara itu kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni

*“Dalam menangani Stunting balita kami dan berbagai pihak -pihak yang terlibat melakukan sesuai arahan dalam sk tim percepatan penurunan Stunting (TPSS) segalanya ikut terlibat mulai dari masyarakat pemerintah dinas dan kepolisian semuanya ikut dalam mendukung penanganan Stunting balita di kabupaten Aceh Tengah.”<sup>37</sup>*

Kemudian disampaikan oleh kabid kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;

*“Penanganan Stunting balita di kabupaten Aceh Tengah ini sudah dijelaskan semuanya di sk tim percepatan penurunan Stunting sumber daya semuanya terlihat seperti jika dari dinas kesehatan ada 17 puskesmas terlibat dokter tim kami ada bidan ada tenaga gizi di lapangan kawan kawan ini bekerja dengan kader,”<sup>38</sup>*

Kemudian Kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 19 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

“Sumber daya semuanya terlibat yang diatur dalam sk Tim percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Misal keterlibatan kami yaitu anggaran untuk penanganan stunting kami pihak DPMK ikut serta dalam hal ini.”<sup>39</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dan pengumpulan data maka dapat dijelaskan bahwa indikator sumber daya menurut teori George C. Edward III berjalan dengan baik Karena semua pihak baik itu Dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Aceh Tengah, Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (BAPPEDA) Aceh Tengah masing masing terlibat dalam penanganan *stunting* dan ikut serta dan mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung penurunan *stunting* balita Aceh Tengah. Sebab indikator sumber daya sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan dan ini sangat penting dilaksanakan.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sifat yang dilakukan para pelaksana dalam menjalankan amanah seperti halnya kejujuran, sifat dan mengutamakan demokratis. Tujuan disposisi adalah agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya yang menjadi acuan dari indikator disposisi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas dan sinkronisasi antara kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan. Sikap dalam penanganan *stunting* balita

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

menunjukkan sikap demokratis dan sikap ini perlu dalam menangani *stunting* balita agar dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di lapangan semua pihak kompak dan pelaksanaannya sinkron dengan yang disampaikan sesuai dengan tujuan sama sama. Kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yakni:

*“Sejauh ini dalam hal penanganan Stunting balita Aceh Tengah semua terlibat dan mengutamakan komitmen yaitu menurunkan angka Stunting dan tidak ada masalah kendala karena kami tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) itu mengutamakan sifat demokratis.”<sup>40</sup>*

kemudian disampaikan oleh kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;

*“Dalam hal ini semua dinas ikut serta sesuai peraturan bupati dan terkait Stunting dalam tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) kami semua satu komitmen yaitu bagaimana caranya Stunting itu turun jadi tidak ada permasalahan karena kami mengutamakan musyawarah.”<sup>41</sup>*

Kemudian kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

*“Semuanya terlibat dalam hal penanganan Stunting kami dengan pihak lain selalu mengutamakan musyawarah jadi tidak ada permasalahan dan kami sepakat semuanya berkomitmen dalam penurunan angka Stunting yang disebut tim.”<sup>42</sup>*

kemudian bidang Analis SDM Aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA , Hasyimi mengemukakan bahwa :

*“Dalam penanganan Stunting tidak ada permasalahan karena kebijakan yang diatur sudah bisa dikatakan 80% tepat karena dibentuknya tim*

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

*percepatan penurunan Stunting semua terarah dan dilaksanakan dengan prosedur dan kami sebulan tu ada melakukan musyawarah terkait Stunting baik itu langsung maupun tidak kami selalu berkomitmen dengan musyawarah. ”<sup>43</sup>*

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara bahwa indikator disposisi telah berjalan dengan baik dalam penanganan *stunting* balita di kabupaten Aceh Tengah karena pihak-pihak terkait mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan tidak ada permasalahan dalam penanganan *stunting* bisa di buktikan bahwa untuk saat ini angka *stunting* Aceh Tengah sudah mulai turun.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan adapun aspek dari struktur birokrasi adalah *standard operating procedure* (SOP). Tujuan dari struktur birokrasi adalah supaya kebijakan yang dibuat dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan agar tidak timbul *red-tape* yakni birokrasi yang rumit. Dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 260/17/DKBPPPA/2023 dijelaskan bahwa yang terlibat dalam penanganan *stunting* mulai dari pemerintah akademisi dan lainnya serta dijabarkan tugasnya di dalam sk dan apa saja yang dilakukan untuk penanganan *stunting* tentang struktur birokrasi kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

*“Struktur birokrasinya bisa di lihat dari sk tim percepatan penanganan Stunting karena semuanya dari sk itu dalam melaksanakan kegiatan.”<sup>44</sup>*

Bidang analis SDM aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa;

*“Kami selalu berpedoman sesuai peraturan bupati jadi strukturnya bisa dilihat dalam sk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Aceh Tengah.”<sup>45</sup>*

Kemudian disampaikan oleh Kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;:

*“Strukturnya bisa kita lihat dari sk percepatan penurunan Stunting.”<sup>46</sup>*

Kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni:

*“Struktur birokrasinya bisa kita lihat dari sk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) yaitu mulai dari bupati, kejaksaan, Dinas dan segalanya terlibat.”<sup>47</sup>*

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN – KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH  
Nomor 000/7 /SK/PTA /2023  
TANGGAL 26 Januari 2023  
di Aceh Tengah

1	2	3	4
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Aceh	Ketua Tim	1. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
2.	Wakil Bupati Aceh	Anggota	2. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
3.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	3. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
4.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	4. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
5.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	5. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
6.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	6. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
7.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	7. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
8.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	8. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
9.	Kepala Dinas Aceh	Anggota	9. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim
10.	Staf Ahli Bupati	Anggota	10. Menentukan dan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas-tugas Tim

Dipindai dengan CamScanner

**Gambar 4.3. Dokumentasi SK Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS) Terkait Tugas-Tugas Pihak dalam Penanganan *Stunting*.**

*Sumber: Dinas BKKBN Aceh Tengah, 2023*

Hasil dari penelitian setelah melakukan wawancara adalah struktur birokrasi dalam penanganan *stunting* balita adalah berjalan dengan optimal karena strukturnya telah jelas dan terarah untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh strukturnya telah detail dan rinci serta mudah dipahami apa saja yang harus dilakukan dan tugas apa saja yang dapat dilaksanakan melalui struktur tersebut.

#### 4.2.2 Koordinasi BKKBN, DPMK, DINKES dan BAPPEDA dalam penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah.

##### 1. Kesatuan Tindakan

Koordinasi pada hakikatnya membutuhkan setiap anggota organisasi atau unit organisasi untuk menyadari keselarasan timbal balik atau penyesuaian tanggung jawabnya dengan anggota atau unit organisasi lainnya atau tidak berjalan sendiri-sendiri. Tujuan kesatuan tindakan adalah mencegah agar permasalahan tidak pecah dalam organisasi. Selanjutnya yang menjadi acuan dari

indikator kesatuan tindakan adalah dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 pada pasal 10 dijelaskan dalam ayat 2 yaitu dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* kementerian/ lembaga, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota dan pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

*“kami dalam tim mempunyai kesatuan tindakan yang sama, sama-sama berkoordinasi untuk tujuan yang sama yaitu melakukan tindakan untuk penurunan angka stunting.”<sup>48</sup>*

Bidang analis SDM aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa;

*“kesatuan tindakan dari tim kami adalah melakukan rembuk stunting.”<sup>49</sup>*

Kemudian disampaikan oleh Kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;:

*“kami adakan rembuk stunting disana kami bahas tentang apa apa saja yang perlu dilakukan untuk penurunan stunting.”<sup>50</sup>*

Kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

“adanya *rembuk stunting*.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik wawancara berkaitan dengan indikator kesatuan tindakan menurut teori Hasibuan kesatuan tindakan telah memuaskan, dalam koordinasi BKKBN, DINKES, BAPPEDA, dan DPMK melakukan kesatuan tindakan yakni dengan adanya *rembuk stunting* untuk membahas apa saja yang di laksanakan dan membahas semua kegiatan yang dilakukan dengan adanya *rembuk stunting*.

## 2. Pembagian Kerja

Dalam suatu organisasi, pilar dasarnya adalah pembagian kerja. Prinsip pembagian kinerja kerja ini adalah jika suatu organisasi diharapkan dapat berhasil mencapai tujuannya, maka ia harus membagi kerjanya. Dengan diberlakukannya pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam upaya dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan pembagian kerja adalah untuk memudahkan kelompok mencapai dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Selanjutnya yang menjadi acuan dalam indikator ini adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 260 /17/DKBPPPA/2023 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dijelaskan bahwa apa saja tugas tugas tim tersebut.

Kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

“kami dalam tim mempunyai tugas dan pembagian kerja yang jelas yang terlampir dalam sk TPPS seperti adanya yang bertugas untuk pengarah, koordinator bidang data dan lainnya. Strategi yang dinas pemberdayaan masyarakat Kampung (DPMK) yang kami lakukan adalah mendukung penuh dalam penurunan Stunting contoh strategi kami lakukan adalah memberikan anggaran dari dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan misal penambah makanan, gizi, vitamin dan lain lain”<sup>52</sup>

Bidang analis SDM aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa;

“kami telah dijelaskan tugas kami secara jelas dalam sk TPPS . Strategi yang dilakukan banyak mulai dari dinas bappeda yaitu melakukan pendataan balita Stunting melakukan validasi data dan melakukan monitoring Stunting bersama dinas terkait. perencanaan program penganggaran untuk Stunting dinas pangan juga ikut serta yaitu memberikan sayur mayur kan ada di desa tu salah satu program nya untuk masyarakat agar makan bergizi, dan dinas perikanan terkait juga yaitu strateginya ada ikan dalam ember untuk penanganan Stunting semuanya mempunyai strategi untuk penurunan Stunting ada sembilan dinas yang ikut serta. Dan strategi yang dilakukan untuk penurunan Stunting bisa dikatakan sudah turun bisa dilihat dari data Stunting Aceh Tengah turun dari 2018 59,30% dan sudah 32%.”<sup>53</sup>



**Gambar 4.4. Data Stunting dari Buku Isaran Bappeda Aceh Tengah di Kantor Bappeda Aceh Tengah.**

Sumber: Dinas Bappeda Aceh Tengah, 2023

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

Kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni:

*“Jelas sudah sangat jelas dan detail pembagian kerja kami di dalam sk TPPS. Dari dinas kami adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga makanan dan pentingnya menjaga kesehatan gizi dan kami juga membahas strategi Stunting ini di pertemuan rembuk Stunting 2022 terkait strategi konvergensi percepatan penurunan Stunting 2022 dan adanya aplikasi elsimil”<sup>54</sup>*



**Gambar 4.5. Pertemuan dengan Bupati Terkait Rembuk Stunting 2022.**

*Sumber: Dinas BKKBN Aceh Tengah, 2023.*

Kemudian disampaikan oleh Kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa;

*“kami melaksanakan tugas dan pembagian kerja sesuai dengan peraturan bupati Aceh Tengah yaitu keputusan namanya sk TPPS . Strategi dinkes adalah menggerakkan seluruh tenaga medis mulai dari 17 puskesmas yang terlibat dokter tim kami ada bidan ada tenaga gizi di lapangan kawan kawan ini bekerja dengan kader kami melakukan intervensi. Intervensi ada dua yaitu spesifik dan intervensi sensitif yang kami lakukan dinkes lakukan adalah intervensi spesifik sasarannya kerjanya adalah bumil, bayi, balita, calon pengantin, dan remaja dan untuk saat ini angka Stunting dari 2018 sudah mulai turun angkanya bisa di lihat dari data dinas kesehatan yaitu aplikasi E-PPGBM”<sup>55</sup>*

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

**Tabel 4.1****Data Prevalensi *Stunting* Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Balita	Jumlah Balita sangat Pendek	Jumlah Balita Pendek	Jumlah Anak <i>Stunting</i>	% Prevalasinsi <i>Stunting</i>
1	Linge	945	40	139	179	18.94
2	Atu Lintang	581	31	113	144	24.78
3	Jagong Jeget	834	51	88	139	16.67
4	Bintang	933	25	85	110	11.79
5	Lut Tawar	1402	11	53	64	4.56
6	Kebayakan	1292	12	45	57	4.41
7	Pegasing	1992	17	49	66	3.31
8	Bies	561	9	27	36	6.42
9	Bebesen	2600	15	58	73	2.81
10	Kute Panang	622	14	93	107	17.20
11	Silih Nara	2111	33	58	91	4.31
12	Ketol	1197	57	114	171	14.39
13	Celala	961	1	18	19	1.98
14	Rusip Antara	856	24	34	58	6.78
	KABUPATEN ACEH TENGAH	16887	340	974	1314	7.78

sumber : (Dinas Kesehatan (Data E-PPGBM Desember ,2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah indikator pembagian kerja dalam koordinasi adalah sudah baik dibuktikan dengan adanya koordinasi antara tim yaitu melaksanakan tugasnya seperti yang diarahkan yaitu Bupati Aceh Tengah sebagai pengarah dalam tim, sekretaris daerah tugasnya mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

### 3. Disiplin

Konsep disiplin kerja memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan manajer dalam karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku dan bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku. Tujuan disiplin adalah menjamin adanya penyatuan tekad untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya yang menjadi acuan indikator disiplin adalah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2018 pada pasal 2 yaitu penurunan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Kabid KPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) DPMK Aceh Tengah, Muttaqi mengemukakan yakni:

*“kami dalam tim Alhamdulillah disiplin dalam melaksanakan tugas.”*<sup>56</sup>

Bidang analis SDM aparatur pada bidang perencanaan sosial budaya dan SDM BAPPEDA, Hasyimi mengemukakan bahwa;

*“kedisiplinan dalam tim in syaa Allah sudah disiplin bisa dikatakan 80% disiplin.”*<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Kabid KPM, Muttaqi, pada tanggal 6 juni 2023, di kantor DPMK Aceh Tengah

Kemudian disampaikan oleh Kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan (DINKES) Aceh Tengah Isma Sawitri mengemukakan bahwa:

*“kami melaksanakan tugas dengan disiplin walaupun terkadang ada kendala tapi kami tetap disiplin.”<sup>58</sup>*

Kepala BKKBN Aceh Tengah, Alam Syuhada mengemukakan hal yang sama, yakni:

*“kami dalam tim melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan in syaa Allah sudah bisa dikatakan disiplin .”<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi indikator disiplin melalui teori Hasibuan sudah optimal dibuktikan dengan adanya penurunan angka *stunting*. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melaksanakan kegiatan dengan disiplin mulai dari analisis situasi, rencana kegiatan, rebus *stunting*, sistem manajemen data *stunting*, pengukuran dan publikasi *stunting*, sampai rewiu kinerja tahunan. Dan Tim Percepatan penurunan *stunting* bersedia menepati dan mematuhi peraturan dengan disiplin sesuai dengan arahan yang dilakukan.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Sub Analisis SDM Aparatur Perencanaan pada bidang perencanaan bidang sosial dan budaya, Hasyimi, pada tanggal 5 JUNI 2023 di kantor BAPPEDA Aceh Tengah

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Kabid Kesehatan Masyarakat, Isma Sawitri, pada tanggal 8 juni 2023 di kantor Dinas Kesehatan Aceh Tengah

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan kepala Dinas BKKBN, Alam Syuhada, pada tanggal 9 juni 2023 di Kampung Kemili Kab Aceh Tengah

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Penanganan *Stunting* Balita di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan *Stunting* Balita di Kabupaten Aceh Tengah disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan dalam Penanganan *Stunting* meliputi indikator pertama Komunikasi kedua sumberdaya ketiga Disposisi keempat Struktur birokrasi telah dilaksanakan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya penurunan angka *Stunting* yang didorong dengan kerja sama dan komitmen yang penuh dalam upaya penanganan *Stunting* mulai dari Kabupaten, Desa dan dukungan Masyarakat.
2. Koordinasi BKKBN, DPMK, BAPPEDA, dan DINKES meliputi indikator kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi antara BKKBN, DPMK, BAPPEDA, dan DINKES semua melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya yaitu DINKES bertugas dalam insentif spesifik dan BAPPEDA bertugas merencanakan program apa saja dalam penanganan *stunting*, BKKBN bertugas dalam sosialisasi dan melakukan upaya dengan tim di desa dan DPMK bertugas melibatkan anggaran dari dana desa untuk penanganan *stunting*. Berdasarkan hasil observasi koordinasi BKKBN, BAPPEDA, DPMK dan DINKES dalam menangani

*stunting* adalah mengadakan pertemuan Rembuk *stunting* dan bersosialisasi dengan masyarakat terkait *stunting*.

## 5.2 Saran

1. Adanya peningkatan pemahaman tentang teknologi aplikasi untuk penurunan *Stunting* agar masyarakat dan yang terkait memahami bahwa pentingnya mendeteksi angka *Stunting* sejak dini.
2. Perlunya kesadaran dan lebih dekat lagi kepada masyarakat Agar masyarakat ada inisiatif dalam dirinya bahwa pengukuran anak balita sangat penting dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aspar Abdul Gani. 2020. *Aspar Abdul Gani, 'Studi Operasional Penurunan Stunting Melalui Upaya Konvergensi Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*. Makassar: Hasanuddin.
- Amiruddin. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi, Mobilitas Sosial dan Perdagangan Transportasi Laut*. Yogyakarta: CV Budi Utama Deepublish.
- Bawon, wahida Yuliana. 2019. *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia.
- Dela Rosita Sari. 2023. *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Dodi Pramana, dkk. 2022. *Budaya Organisasi*. Medan : CV Merdeka Kreasi Group
- Joko Pramono. 2022. *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia*. Surakarta: Graha Ilmu.
- Kustanti Anita. 2019. *Sepenggal Kisah Inspiratif Inovasi Pencegahan Stunting*. Yogyakarta: Balilatfo.
- Mamik. 2015. *Metodelogi Kualitatif*. Taman: Taman Siduarjo.
- Nur Sayidah. 2018. *Metodolologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Jawa Timur: Cendikia Indonesia.
- Siyotho Sandu. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Arnild Mekarisce Augina, 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol 12 Nomor 3
- Ika Isnaini, 2021. *Tekhnik Pengambilan Sampel Purpose Dan Snowball Sampling*. Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol 17 Nomor 2-Mei p-ISSN 2549-7332 e-ISSN 2614-1167

Sutarto dkk, 2018. *Stunting, Faktor Resiko Dan Pencegahannya*. jurnal Agromedicine. Vol 5 Nomor 1

### **Website**

Databoks, akses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-Stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>

Databoks, di akses di  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-alita-Stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>

### **Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### Dimensi Implementasi Kebijakan

##### A. Komunikasi

1. Bagaimana proses komunikasi BKKBN/BAPPEDA/DINAS KESEHATAN/DPMK dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan *Stunting* di kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah implementasi tersebut dapat diterima secara jelas dan akurat dalam masyarakat ?

##### B. Sumber Daya

1. Apakah ada kewenangan untuk menjamin program berjalan dengan yang diharapkan dalam penanganan *Stunting* di kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah ada fasilitas yang dipakai untuk melakukan program seperti dana dan sarana prasarana ?

##### C. Disposisi

1. Apakah dalam melaksanakan program penurunan *Stunting* BKKBN/BAPPEDA/DINAS KESEHATAN/DPMK bisa menjalankan program dengan sikap /respon yang baik ?
2. Apakah pelaksanaan program tersebut berjalan efektif

#### **D. Struktur Birokrasi**

1. Apakah dalam melaksanakan program penurunan *Stunting* BKKBN/BAPPEDA/DINAS KESEHATAN/DPMK bisa menjalankan program dengan sikap /respon yang baik ?
2. Apakah pelaksanaan program tersebut berjalan efektif?

#### **DIMENSI KOORDINASI**

##### **A. Kesatuan Tindakan**

1. Bagaimana kesatuan tindakan DPMK, DINKES, BAPPEDA dan BKKBN dalam penanganan *stunting* balita di Aceh Tengah ?
2. Apakah kesatuan tindakannya sudah optimal?

##### **B. Pembagian kerja**

1. Bagaimana pembagian kerja dalam penanganan *stunting* balita di kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah dalam pembagian kerja sudah berjalan efektif ?

##### **C. Disiplin**

1. Apakah DPMK, DINKES, BAPPEDA, dan BKKBN disiplin daalam penanganan *stunting* balita di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Dan apakah ada kendala dalam melaksanakan tugas ?

## Lampiran 2 Surat Keputusan Bimbingan



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 605/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang**
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
  - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PI/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penertaman Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** Menunjuk dan mengangkat Saudara
- Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing I
  - Mirza Farukri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Sastra Madani  
 NIM : 190802001  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah
- KEDUA** Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,  
  
**RULLY MULLA**

- Tembusan**
- Mektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  - Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  - Yang bersangkutan.



### Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-1097/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan BKKBN Aceh Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah
3. Kepala DPMK Aceh Tengah
4. Kepala Bappeda Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SASTRA MADANI / 190802001**  
 Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Perumahan cadek village no B12 kecamatan Baitussalam kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 November 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian

### 1. Dinkes Aceh Tengah

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

---

Jln. Abdul Wahab No 151, Kebayakan, Telepon (0641) 21286 - 21801 Takengon

Nomor	: 800.2 / 1409 / dinkes / 2023	Takengon, 06 Juni 2023
Lampiran	: -	Kepada Yth
Perihal	: Izin Penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
		Di - <u>Tempat</u>

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Nomor B-1097/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sastra Madani  
NIM : 190802001  
Judul : Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan judul penelitian yang sudah ditentukan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

  
**Dr. YUNASRI, M.Kes**  
Pembina Tk I, IV/b  
Nip. 19740114 200312 1 007



## 2. DPMK Aceh Tengah

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
 فمر بنته كروفاتن اچيه تنه  
 دینس فمیردایان مشارکت دان کفعم  
 Jalan Lebe Kader SP. IV Bebesen - Takengon  
 website: [dispmk.acehtengahkab.go.id](http://dispmk.acehtengahkab.go.id) - email: [dpmk.acehtengah@gmail.com](mailto:dpmk.acehtengah@gmail.com)

---

Nomor : 420/ 336/DPMK/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Takengon, 14 Juni 2023

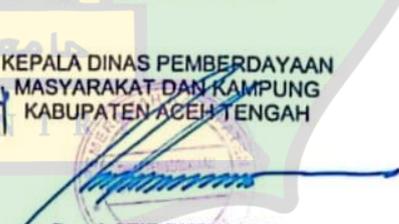
Kepada Yth,  
 Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan  
 UIN AR-RANIRY  
 di-  
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN AR-RANIRY Nomor : B-1097/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Dengan ini kami menerangkan :

Nama/NIM : SASTRA MADANI / 190802001  
 Semester/Jurusan : 8 / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat Sekarang : Perumahan Cadek Village Nomor B12 Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Ilmiah pada tanggal 06 Juni 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah.**

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya, terima kasih.

  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
 KABUPATEN ACEH TENGAH  
  
**Drs. LATIF RUSDI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196912181994031003

### 3. Bappeda Aceh Tengah

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jln. Yos Sudarso No 184 email: bappeda@acehtengahkab.go.id  
 TAKENGON 24553

Takengon, 13 Juni 2023 M  
 31 Dzulqadab 1444 H

Nomor : 050/387/Bappeda  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
 Dan Ilmu Pemerintah  
 Univ. Islam Negeri Ar-Raniry  
 Di Tempat

Schubungan dengan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas Islam Negeri Negeri Ar-Raniry Nomor : B  
 1097/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal  
 Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami menerangkan:

Nama : **SASTRA MADANI**  
 NIM : 190802001  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa kami memberikan Izin dengan nama tersebut di atas  
 untuk melaksanakan penelitian dan telah melakukan pengambilan  
 Data dan Interview di Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan  
 Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan  
 Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian Kami sampaikan untuk bahan selanjutnya, terima  
 kasih.

KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN ACEH TENGAH

  
**Drs. AMIR HAMZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19641206 198811 1 001

 Dipindai dengan CamScanner

## 4. DKBPPA



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jalan Sp. Kelaping – Lukup Badak No. Pegasing Telp. (0643) 7426436

---

Takengon, 13 Juni 2023

Nomor : 00.1/ 163 /2023  
 Lampiran :  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
 Ilmu Pemerintahan  
 di\_ \_\_\_\_\_  
 Tempat

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan No:B-1097/Un.08/FISIP.L/PP.00.9/05/2023, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa an. SASTRA MADANI / 190802001 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah, bahwa benar nama tersebut telah melakukan penlitian pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.



**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**AGUS HANEFAM SYUHADA,MM**  
 Pembina Utama Muda/Nip. 19670123 199211 1 001

جامعة الرانيري  
 AR-RANIRY

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah
2. Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tengah
3. Yang bersangkutan

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

1. wawancara dengan Bapak Drs,H .Alam Syuhada MM selaku kepala dinas DKBPPPA



2. Wawancara dengan bapak Hasyimi ST Selaku Bidang Analisi sdm di Bappeda



3. Wawancara dengan Bapak Muttaqi SE selaku Kabid KPM DPMK



4. wawancara dengan ibu selaku Kabid



### Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-1097/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan BKKBN Aceh Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah
3. Kepala DPMK Aceh Tengah
4. Kepala Bappeda Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SASTRA MADANI / 190802001**  
 Semester/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Perumahan cadek village no B12 kecamatan Baitussalam kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 November 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian

### 1. Dinkes Aceh Tengah



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

---

Jln. Abdul Wahab No 151 Kebayakan Telepon (0641) 21286 - 21801 Takengon

<p>Nomor : 800 2 / 1409 / dinkes / 2023 Lampiran : - Perihal : Izin Penelitian</p>	<p>Takengon, 06 Juni 2023 Kepada Yth Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Di - <u>Tempat</u></p>
--	--

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Nomor B-1097/Un 08/FISIP.I/PP.00 9/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sastra Madani  
 NIM : 190802001  
 Judul : Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah  
 Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan judul penelitian yang sudah ditentukan  
 Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Dr. YUNASRI, M.Kes**  
Pembina Tk I, IV/b  
Nip. 19740114 200312 1 007



## 2. DPMK Aceh Tengah

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**  
 فمر بنته كيو فانتن اچيه تنه  
 دینس فمیردایان مشارکت دان کفعم  
 Jalan Lebe Kader SP. IV Bebesen - Takengon  
 website: [dispmk.acehtengahkab.go.id](http://dispmk.acehtengahkab.go.id) - email: [dpmk.acehtengah@gmail.com](mailto:dpmk.acehtengah@gmail.com)

---

Nomor : 420/ 336/DPMK/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Takengon, 14 Juni 2023

Kepada Yth,  
 Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan  
 UIN AR-RANIRY  
 di-  
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN AR-RANIRY Nomor : B-1097/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Dengan ini kami menerangkan :

Nama/NIM : SASTRA MADANI / 190802001  
 Semester/Jurusan : 8 / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat Sekarang : Perumahan Cadek Village Nomor B12 Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Ilmiah pada tanggal 06 Juni 2023 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah.**

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya, terima kasih.

  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN KAMPUNG  
 KABUPATEN ACEH TENGAH  
**Drs. LATIF RUSDI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196912181994031003



### 3. Bappeda Aceh Tengah

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jln. Yos Sudarso No 184 email: bappeda@acehtengahkab.go.id  
 TAKENGON 24553

Takengon, 13 Juni 2023  
 31 Dzulqadha 1444 H

Nomor : 050/387/Bappeda  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
 Dan Ilmu Pemerintahan  
 Univ. Islam Negeri Ar-Raniry  
 Di Tempat

Schubungan dengan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas Islam Negeri Negeri Ar-Raniry Nomor : B  
 1097/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal  
 Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami menerangkan:

Nama : **SASTRA MADANI**  
 NIM : 190802001  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa kami memberikan Izin dengan nama tersebut di atas  
 untuk melaksanakan penelitian dan telah melakukan pengambilan  
 Data dan Interview di Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan  
 Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan  
 Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian Kami sampaikan untuk bahan selanjutnya, terima  
 kasih.

**KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
  
**Drs. AMIR HAMZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19641206 198811 1 001

 Dipindai dengan CamScanner

## 4. DKBPPA

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jalan Sp. Kelaping – Lukup Badak No. Pegasing Telp. (0643) 7426436

---

Takengon, 13 Juni 2023

Nomor : 00.1/ 163 /2023  
Lampiran :  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Pemerintahan  
di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan No:B-1097/Un.08/FISIP.L/PP.00.9/05/2023, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa an. SASTRA MADANI / 190802001 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah, bahwa benar nama tersebut telah melakukan penlitian pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN ACEH TENGAH**  
  
**AGUS HANEFAM SYUHADA,MM**  
Pembina Utama Muda/Nip. 19670123 199211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah
2. Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tengah
3. Yang bersangkutan

**جامعة الرانيري**  
**AR-RANIRY**

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

1. wawancara dengan Bapak Drs,H .Alam Syuhada MM selaku kepala dinas DKBPPPA



2. Wawancara dengan bapak Hasyimi ST Selaku Bidang Analisi sdm di Bappeda



3. Wawancara dengan Bapak Muttaqi SE selaku Kabid KPM DPMK



4. wawancara dengan ibu selaku Kabid



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Sastra Madani  
 Tempat Tanggal Lahir : Rutih, 24 September 2002  
 Nomor Handphone : 082229245546  
 Alamat : Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara Kab.  
 Aceh Tengah  
 Email : 190802001@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri 9 Silih Nara  
 Sekolah Menengah pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri Angkup  
 Sekolah Menengah Atas : Man 2 Aceh Tengah

### Sertifikat

Ma'had Jamiah : B | 2019 | Ma'had Jamiah  
 TOEFL : | | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 komputer : B | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry  
 Magang : A - | 2022 | BPSDM Aceh

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Sastra Madani